

PERSEPSI ANGGOTA GAPOKTANHUT WONO LESTARI TERHADAP PENGELOLAAN HUTAN KEMASYARAKATAN DESA JATI MULYO KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**PERCEPTION OF MEMBERS OF GAPOKTANHUT WONO LESTARI TOWARDS COMMUNITY FOREST MANAGEMENT IN JATI MULYO VILLAGE, TANJUNG JABUNG TIMUR REGENCY**Maria Ulfa*¹, Rince Muryunika¹, Agnes Stefany Manullang¹¹ Jurusan Kehutanan, Fakultas Pertanian, Univertas Jambi, IndonesiaEmail Korespondensi : maria.ulfa@unja.ac.id**Abstrak**

Salah satu pemegang izin kelola HKm adalah Gapoktanhut Wono Lestari berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Nomor : SK.5787/MENLH PSKL /PKPS /PSL.0/9/ 2018, disahkan pada tanggal 10 September 2018 tentang IUPHKm pada areal hutan produksi tetap seluas ± 93 Ha di Desa Jati Mulyo, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi. Program hutan kemasyarakatan (HKm) dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan juga menciptakan lapangan kerja melalui setiap aspek dalam fungsi pengelolaan hutan seperti planning, organizing, actuating dan controlling (POAC). Penelitian dilaksanakan di Desa Jati Mulyo, Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada bulan Juli sampai agustus tahun 2023. Data diambil dengan cara wawancara menggunakan kuisioner dan pengambilan sampel menggunakan metode sensus dengan jumlah total responden sebanyak 50 (lima puluh) orang. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode analisis skala likert yang kemudian hasil dari pengelolaan data dalam bentuk presentasi tersebut akan di ubah ke dalam bentuk data kualitatif dengan menggunakan metode analisis statistik deskriptif. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, didapatkan hasil bahwa responden memiliki pandangan/ persepsi baik dengan presentase 79.00 % terhadap pengelolaan Hutan Kemasyarakatan Desa Jati Mulyo Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Responden memiliki persepsi yang baik terhadap pengelolaan berdasarkan fungsi perencanaan (planning) dengan persentase sebesar 82.36%, berdasarkan fungsi organisasi (*organizing*) sebesar 80.97%, berdasarkan fungsi pelaksanaan (*actuating*) sebesar 76.81% dan berdasarkan fungsi pengawasan (*controlling*) sebesar 74.75%. Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan Desa Jati Mulyo oleh Anggota Gapoktanhut Wono Lestari berdasarkan analisis POAC sudah dilakukan berdasarkan rencana tata kelola (RKT/ RKU) yang telah di susun, akan tetapi perlu dilakukan pemaksimalan agar seluruh komponen fungsi manajemen POAC pada pengelolaan HKm dapat terlaksana.

Kata Kunci: Persepsi, Gapoktanhut, POAC, Hutan Kemasyarakatan (HKm)**Abstract**

One of the HKm management permit holders is Gapoktanhut Wono Lestari based on the Decree of the Minister of Environment and Forestry with Number:SK.5787/MENLH PSKL /PKPS /PSL.0/9/ 2018, ratified on September 2018 concerning IUPHKm in production forest areas still covering an area of ± 93 Ha in Jati Mulyo Village, East Tanjung Jabung Regency, Jambi Province. The community forest program (HKm) can increase community income and also create jobs through every aspect of forest management functions such as planning, organizing, actuating and controlling (POAC). The research was carried out in Jati Mulyo Village, Dendang District, East Tanjung Jabung Regency from July to August 2023. Data was collected by interviews using questionnaires and sampling using the census method with a total number of respondents of 50 (fifty) people. The data analysis method used in this research is using the Likert scale analysis method, then the results of data management in the form of presentations will be converted into qualitative data using descriptive statistical analysis methods. Based on the research conducted, the results showed that respondents had a good view/perception with a percentage of 79.00% regarding the management of Community Forests in Jati Mulyo Village, East Tanjung Jabung Regency. Respondents have a good perception of management based on the planning function with a percentage of 82.36%, based on the organizational function (*organizing*) of 80.97%, based on the implementation function (*actuating*) of 76.81% and based on the monitoring (*controlling*) function of 74.75%. Jati Mulyo Village Community Forest Management by Gapoktanhut Wono Lestari Members based on POAC analysis has been carried out based on the management plan (RKT/RKU) that has been prepared, however it needs to be maximized so that all components of the POAC management function in HKm management can be implemented.

Key words: Perception, Gapoktanhut, POAC, Community Forest (HKm)

Genesis Naskah (Diterima : Mei 2024, Disetujui : Juni 2024, Diterbitkan : Juli 2024)

PENDAHULUAN

Latar Belakang

HKm merupakan suatu sistem pengelolaan hutan oleh masyarakat desa sekitar hutan yang ditujukan untuk mendukung kehidupan dan kesejahteraan dengan tetap memperhatikan kelestarian hutan (Kaskoyo et al., 2017). Salah satu pemegang izin kelola HKm adalah Gabungan Kelompok Tani Hutan (Gapoktanhut). Gapoktanhut adalah gabungan dari beberapa kelompok tani hutan (KTH) yang merupakan kumpulan petani yang mengelola usaha bidang kehutanan di dalam dan di luar kawasan hutan. Peran kelompok tani diwujudkan dalam kegiatan fisik berhubungan dengan pengelolaan hutan dan non fisik yang berhubungan dengan pengembangan organisasi/lembaga (Silalahi, 2011). Konsep awal pendirian HKm diwujudkan melalui pembentukan dan penguatan kelembagaan, dengan harapan kelembagaan HKm dapat menjadi ujung tombak penyelenggaraan HKm dalam jangka panjang (Nandini, 2017). Keberadaan lembaga tersebut dapat menjadi landasan pelaksanaan program HKm, karena saat ini masih terdapat kendala dan tantangan dalam pelaksanaannya (Safe'i et al., 2018).

Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm) kepada Gapoktanhut Wono Lestari berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Nomor : SK.5787/MENLH PSKL /PKPS /PSL.0/9/ 2018, disahkan pada tanggal 10 September 2018 tentang IUPHKm pada areal hutan produksi tetap dengan jenis tanah tropohemists (tanah gambut) seluas ± 93 Ha di Desa Jati Mulyo, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi. Gapoktanhut Wono Lestari terdiri dari 50 anggota yang telah dilibatkan untuk berpartisipasi dalam pengelolaan menggunakan sistem agroforestri.

Masyarakat mempunyai persepsi dan cara pandang tersendiri mengenai apa yang dipikirkan, dilihat dan apa yang dirasakan. Persepsi masyarakat dipengaruhi oleh karakteristik sosialnya seperti pendidikan, umur, jumlah tanggungan dan pengetahuan masyarakat tentang pengelolaan hutan (Susanti et al., 2021). Mengetahui persepsi dan sikap masyarakat terhadap sumber daya alam dinilai akan sangat membantu dalam mengembangkan strategi tata kelola yang efektif dan melestarikan sumber daya alam secara berkelanjutan dalam

upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat yang tinggal disekitar hutan (Damanik, 2019).

Program HKm dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan menciptakan lapangan pekerjaan melalui setiap aspek dalam fungsi manajemen pengelolaan hutan seperti planning, organizing, actuating dan controlling (POAC). Manajemen adalah suatu proses dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya (Athoillah, 2017). POAC menjadi sangat strategis sifatnya untuk mengevaluasi pengelolaan HKm yang dilakukan masyarakat (Sanjaya et al., 2017). Pengelolaan hutan yang dilakukan oleh masyarakat berkaitan dengan pemanfaatan hutan sebagai sumberdaya alam dalam suatu ekosistem, sehingga semua aspek tata kelola hutan perlu diperhatikan dan persepsi anggota gabungan kelompok tani hutan (Gapoktanhut) Wonolestari mengenai POAC dalam pengelolaannya juga harus diperhatikan agar masyarakat dapat menerima manfaat yang maksimal tanpa mengganggu kelestarian hutan.

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk

1. Menganalisis Persepsi anggota Gapoktanhut Wono Lestari terhadap pengelolaan Hutan Kemasyarakatan Desa Jati Mulyo Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
2. Menganalisis Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan Desa Jati Mulyo oleh Anggota Gapoktanhut Wono Lestari berdasarkan analisis POAC.

METODOLOGI PENELITIAN

Waktu dan Tempat

Penelitian ini dilaksanakan dalam jangka waktu dua bulan terhitung mulai dari bulan Juli sampai dengan bulan Agustus 2023. Penelitian ini dilaksanakan di areal kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm) di kawasan hutan produksi tetap di Desa Jati Mulyo, Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi.

Alat dan Bahan

Alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini lembar panduan wawancara, kamera, laptop dan alat tulis.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dan kuantitatif

Metode Pengumpulan Sampel

Pengambilan sampel penelitian ini ditentukan menggunakan metode sensus dengan jumlah 50 (limapuluh) responden yang merupakan jumlah anggota Gapoktanhut pada SK penetapan Gapoktanhut Wono Lestari.

Metode Pengumpulan Data

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder, baik data yang bersifat kualitatif dan kuantitatif. Data primer yang diperoleh diantaranya data identitas petani (umur, pendidikan, pekerjaan, jumlah anggota keluarga, luas lahan yang dikelola), fungsi pengelolaan yang dilakukan oleh Gapoktanhut Wono Lestari (perencanaan, organisasi, pelaksanaan, pengawasan) dan Persepsi Anggota Gapoktanhut Wono Lestari terhadap Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan Desa Jati Mulyo. Sedangkan data sekunder diperoleh dengan mempelajari literatur ilmiah hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang dilakukan.

Metode yang digunakan untuk pengumpulan data yaitu wawancara semi terstruktur yang menggunakan panduan berupa kuesioner, observasi lapangan dan studi pustaka yang dilakukan dengan cara mempelajari literatur, baik yang berasal dari hasil-hasil penelitian terdahulu serta laporan yang berasal dari lembaga terkait.

Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan cara responden memberikan penilaian terhadap masing-masing pernyataan yang telah diberikan oleh peneliti. Berdasarkan penilaian tersebut maka akan diberi skor dan skor tersebut dijumlahkan permasing- masing point pernyataan sehingga akan diketahui tingkat persepsi anggota Gapoktanhut Wono Lestari terhadap pengelolaan Hutan Kemasyarakatan Jati Mulyo. Penilaian dilakukan dengan membandingkan jumlah skor jawaban yang diperoleh dengan nilai skor tertinggi kemudian dikalikan dengan 100% maka akan dihasilkan persentase yang diharapkan.

Proses analisis data dilakukan menggunakan perangkat Microsoft Excel, hasil dari pengelolaan data dalam bentuk presentasi akan di ubah ke dalam bentuk data kualitatif dengan menggunakan metode analisis statistik deskriptif, analisis ini berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul dengan skala berupa kategori persepsi baik, sedang dan buruk, dengan demikian dapat diperoleh kesimpulan terkait tingkat persepsi Gapoktanhut Wono Lestari terhadap pengelolaan Hutan kemasyarakatan Jati Mulyo.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Ymum Wilayah Penelitian

Desa Jati Mulyo adalah salah satu desa dari 6 (enam) Desa di Kecamatan Dendang, yang kondisi Geografisnya sebagian besar merupakan tanah gambut dan rawa. Desa Jati Mulyo memiliki luas wilayah 196,00 Km² (19.600 hektar) atau 41,09 % dari luas Kecamatan Dendang, (luas wilayah kecamatan Dendang adalah 477,17 Km²) sebagian besar merupakan lahan perkebunan dan pertanian sawah (RPJM desa Jati Mulyo Tahun 2023-2028). Hal ini lah yang menjadi potensi utama di desa sehingga Mata pencaharian pokok sebagian besar penduduk bertani/berkebun.

Secara administrasi pemerintahan Hutan Kemasyarakatan yang dikelola oleh Gapoktanhut Wono Lestari terletak di Desa Jati Mulyo, Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi dengan luasalan 93 Ha berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Nomor : SK 5787/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/9/2018. Jarak Desa Jati Mulyo ke ibukota provinsi sejauh 80 Km dan jarak Desa Jati Mulyo ke ibukota kabupaten sekitar 15 Km, sedangkan jarak tempat penelitian ke ibukota kecamatan sekitar 2,5 Km dengan akses jalan yang cukup baik. Jarak desa Jati Mulyo ke lokasi HKm ditempuh dengan waktu ±30 menit. Aksesibilitas menuju hutan kemasyarakatan (HKm) dari desa menuju lahan HKm dapat ditempuh melalui jalan darat dengan menggunakan kendaraan roda dua. Untuk dapat masuk lahan/ ladang responden harus ditempuh dengan berjalan kaki karena tidak ada akses jalan yang dapat ditempuh oleh kendaraan

Karakteristik Responden

Pada saat dilapangan peneliti mewawancarai sebanyak 50 responden yang merupakan jumlah anggota Gapoktanhut pada SK penetapan Gapoktanhut Wono Lestari. Karakteristik responden dapat mendeskripsikan keadaan sosial masyarakat atau anggota Gapoktanhut yang mengelola hutan kemasyarakatan di Desa Jati Mulyo Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Berikut karakteristik responden yang diteliti :

Umur, Pendidikan dan Jumlah Anggota Keluarga Responden

Umur, Pendidikan dan Jumlah anggota responden disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Karakteristik Responden Berdasarkan Umur, Tingkat Pendidikan dan Jumlah Anggota Keluarga

Variabel	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
Umur		
29 – 36	6	12
37 – 44	13	26
45 – 52	17	34
53 – 60	10	20
61 – 68	4	8
Pendidikan		
Tidak Bersekolah	7	14
SD	17	34
SMP	12	24
SMA	12	24
Perguruan Tinggi	2	4
Jumlah Anggota Keluarga		
0 – 3	23	46
4 – 6	27	54

Sumber: Data primer yang sudah diolah 2023

Hasil penelitian diperoleh umur 50 responden, berdasarkan usia termuda adalah 29 tahun dan usia tertua adalah 65 tahun. Data pada Tabel menunjukkan kebanyakan responden berada pada klasifikasi umur produktif untuk bekerja. Hal ini sejalan dengan Yuzen *et al.*, (2014) yang menyebutkan bahwa hubungan antara umur masyarakat dengan tingkat persepsi

masyarakat berada umur produktif akan memiliki pola pikir dan persepsi yang baik.

Tingkat pendidikan kebanyakan responden dalam penelitian ini berada pada klasifikasi pendidikan terakhir SD sebanyak 17 orang dengan persentase 34%. Pada jenjang pendidikan SMP dan SMA sebanyak 12 orang, yang sampai pada tingkat perkuliahan (S1) dengan jumlah responden 2 orang dan terdapat 7 orang responden yang tidak mengenyam pendidikan (tidak bersekolah) dengan persentase sebanyak 14%. Soekartawi (1986) menyatakan bahwa dengan tingkat pendidikan yang tinggi maka akan mendongkrak tingkat kecakapan dan pengetahuan masyarakat sehingga dianggap mampu untuk berfikir secara rasional dan hati-hati dalam bersikap.

54% responden mempunyai jumlah anggota keluarga sebanyak 0 - 3 orang dan terdapat 46% responden pada jumlah anggota keluarga 4 – 6 orang. Apabila tingkat jumlah anggota keluarga semakin sedikit berarti semakin sedikit pula kebutuhan yang harus dipenuhi keluarga, begitu juga sebaliknya semakin banyak jumlah keluarga yang tinggal dalam satu rumah maka semakin banyak biaya yang dikeluarkan dalam pemenuhan kebutuhan. Besarnya jumlah anggota keluarga dapat menjadi suatu potensi tenaga kerja dalam menambah penghasilan sehingga kebutuhan minum bisa terpenuhi.

Pekerjaan Responden

Jenis pekerjaan responden (Tabel 2.) merupakan pekerjaan yang menjadi sumber mata pencaharian. Jenis pekerjaan ini terdiri dari dua, yaitu: pekerjaan utama dan pekerjaan sampingan.

Tabel 2. Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan

Variabel	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
Pekerjaan Utama		
Perangkat Desa	5	10
Berkebun	27	54
Karyawan	6	12
Wiraswasta	4	8
Ibu Rumah Tangga	3	6
Buruh Tani	3	6
Cleaning Service	1	2
Tukang Mebel	1	2

Pekerjaan Sampingan		
Tidak ada	21	42
Berkebun	22	44
Meubel/ tukang	5	10
Buruh	1	2
Supir	1	2

Sumber : Data primer yang sudah diolah 2023

Berdasarkan tabel di atas dari ke- 50 responden, 54% responden mempunyai pekerjaan utama berkebun, pekerjaan yang sangat bergantung pada sumber daya lahan dan berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa responden memiliki pekerjaan sampingan berkebun dengan persentase 44% dan pada 21 orang responden tidak memiliki pekerjaan sampingan.

Luas Lahan yang di Kelola dan Tahun Pengelolaan

Luas lahan yang dikelola dan tahun pengelolaan disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Karakteristik Responden Berdasarkan Luas Lahan yang Dikelola dan Tahun Pengelolaan

Variabel	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
Luas Lahan		
Belum ada	5	10
0.5 Ha- 1 Ha	32	64
1.5 Ha – 2 Ha	13	26
Tahun Pengelolaan		
Belum Dikelola	15	30
2020	9	18
2021	5	10
2022	16	32
2023	5	10

Sumber : Data primer yang sudah diolah 2023

Luas areal pengelolaan hutan kemasyarakatan terbagi berdasarkan kemampuan responden untuk melakukan pengelolaan, setiap responden memiliki kemampuan mengelola lahan yang berbeda-beda sehingga luas lahan yang dimiliki setiap responden pun berbeda-beda. Berdasarkan tabel di atas dari ke- 50 responden bahwa terdapat perbedaan dalam tahun pengelolaan pada lahan HKm. Waktu paling lama melakukan pengelolaan pada lahan HKm dimulai dari tahun 2020 yang. Hasil penelitian yang dilakukan juga menemukan

bahwa ada anggota Gapoktanhut yang sama sekali belum melakukan pengelolaan lahan

Persepsi Anggota Gapoktanhut Terhadap Pengelolaan Hutan

Untuk penelitian selanjutnya, karna penelitian ini belum dapat dikatakan sempurna, diharapkan kepada peneliti selanjutnya dapat meneliti mengenai kegiatan pengelolaan selanjutnya agar Hutan Kemasyarakatan Desa Jati Mulyo ini dapat terus lestari.

1. Persepsi Anggota Gapoktanhut pada Pengelolaan Hutan Berdasarkan Fungsi Perencanaan

Pada tingkat persepsi anggota Gapoktanhut Wono Lestari pada pengelolaan hutan berdasarkan fungsi perencanaan, sebanyak 50 orang atau 100% responden memiliki persepsi yang baik dengan total persentase sebesar 82.86%. Hal ini diperoleh berdasarkan proses pengambilan data yang telah dilakukan terhadap responden bahwa adanya keterlibatan anggota Gapoktanhut Wono Lestari dalam kegiatan-kegiatan perencanaan program pembangunan yang akan dilaksanakan dan anggota gapoktanhut juga terlibat dalam penyusunan rencana kerja untuk pengelolaan pada kawasan HKm.

2. Persepsi Anggota Gapoktanhut pada Pengelolaan Hutan Berdasarkan Fungsi Organisasi

Secara keseluruhan tingkatan persepsi anggota Gapoktanhut Wono Lestari pada pengelolaan hutan berdasarkan fungsi organisasi, sebanyak 50 orang atau 100% responden memiliki persepsi yang baik mengenai pengelolaan hutan berdasarkan fungsi organisasi dengan persentase 80.97%. Hal ini diperoleh berdasarkan proses pengambilan data yang telah dilakukan, responden menunjukkan bahwa adanya kesadaran dari anggota Gapoktanhut Wono Lestari terhadap pentingnya kelembagaan dan sistem kelembagaan yang dibangun didalam suatu kelompok/ organisasi.

3. Persepsi Anggota Gapoktanhut pada Pengelolaan Hutan Berdasarkan Fungsi Pelaksanaan

Secara keseluruhan tingkatan persepsi anggota Gapoktanhut Wono Lestari

pada pengelolaan hutan berdasarkan fungsi pelaksanaan, sebanyak 50 orang atau 100% responden memiliki persepsi yang baik dengan persentase 76.81%. Hal ini diperoleh berdasarkan proses pengambilan data yang telah dilakukan, yang merupakan tahap terpenting dalam program, inti dari keberhasilan suatu program adalah pelaksanaan. Wujud nyata partisipasi pada tahap ini dapat digolongkan menjadi tiga, yaitu partisipasi dalam bentuk sumbangan pemikiran, bentuk sumbangan materi dan bentuk keterlibatan sebagai anggota.

4. Persepsi Anggota Gapoktanhut pada Pengelolaan Hutan Berdasarkan Fungsi Monitoring/ Evaluasi

Secara keseluruhan tingkatan persepsi anggota Gapoktanhut Wono Lestari pada pengelolaan hutan berdasarkan fungsi pelaksanaan, sebanyak 50 orang atau 100% responden memiliki persepsi yang baik dengan persentase 74.75% untuk data lebih lengkap dapat dilihat pada lampiran 6. Hal ini diperoleh berdasarkan proses pengambilan data yang telah dilakukan, tahap evaluasi dianggap penting sebab keikutsertaan anggota gapoktanhut pada tahap ini dianggap sebagai umpan balik yang dapat memberi masukan demi perbaikan pelaksanaan program HKM yang sudah dilakukan.

Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan Menggunakan Analisis POAC

Beberapa program pengelolaan Hutan Kemasyarakatan Desa Jati Mulyo dengan fungsi manajemen pengelolaan hutan berdasarkan analisis POAC (*Planning, Organizing, Actuating, Controlling*) sudah dilaksanakan oleh anggota gapoktanhut sesuai dengan RKT/ RKU yang sudah disusun sebelum pengelolaan HKM dimulai. Responden menyadari bahwa masing-masing fungsi manajemen saling berkaitan dan membentuk suatu sistem dimana masing-masing unsurnya tidak boleh terlepas satu sama lainnya (Nanawi, 2013). Pengelolaan hutan kemasyarakatan Desa Jati Mulyo menggunakan analisis POAC adalah sebagai berikut :

1. Pengelolaan Hutan Berdasarkan Perencanaan

Perencanaan (*planning*) merupakan kegiatan yang berhubungan dengan pemilihan alternatif, metode operasional, prosedur dan program yang ditujukan untuk mencapai tujuan

yang dapat dicapai. Dalam kegiatan manajemen hal yang pertama sekali dilakukan untuk mencapai tujuan adalah perencanaan. Perencanaan adalah merupakan fungsi manajemen yang paling dasar dibandingkan dengan fungsi manajemen lainnya. Hal ini dapat dipahami, karena memang pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen lainnya sangat bergantung pada fungsi perencanaan (Sondakh *et al.*, 2019). Perencanaan pada pengelolaan Hutan Kemasyarakatan Desa Jati Mulyo yang dilakukan oleh Anggota Gapoktanhut Wono lestari disusun dalam RKU (rencana kerja umum) dan RKT (rencana kerja tahunan). Penyusunan RKU/ RKT disesuaikan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (PerMenLHK) mengenai perhutanan sosial yang tertuang dalam PerMenLHK No. 09 tahun 2021.

Pada RKU/ RKT yang telah disusun, sasaran kegiatan yang akan dilakukan pada pengelolaan HKM Desa Jati Mulyo diantaranya adalah kegiatan konservasi, perlindungan dan pengamanan hutan, pemanfaatan hasil hutan, pemanfaatan kawasan hutan dan pemanfaatan jasa lingkungan. Perencanaan pengelolaan yang disusun diharapkan dapat dilaksanakan pada pengelolaan yang akan dilakukan pada kawasan HKM. Pengelolaan hutan kemasyarakatan berdasarkan perencanaan dapat ditunjukkan melalui beberapa aspek seperti kegiatan survei lapangan lokasi HKM yang akan dikelola, penyusunan rencana pengelolaan, rapat koordinasi pengelolaan HKM, sebagai sumber informasi mengenai HKM dan mengajukan usul/saran pengelolaan HKM yang akan dilakukan.

2. Pengelolaan Hutan Berdasarkan Organisasi

Setelah fungsi perencanaan, maka fungsi manajemen yang kedua adalah pengorganisasian. Organisasi (*organizing*) merupakan fungsi manajemen yang merangkum semua kemungkinan potensi yang ada di dalam sekelompok orang atau bagan organisasi untuk bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Secara umum batasan pengorganisasian adalah merupakan keseluruhan proses pengelompokan orang-orang, alat-alat, tugas-tugas, wewenang dan tanggung jawab sedemikian rupa sehingga membentuk suatu wadah yang dapat digerakkan sebagai suatu kesatuan dalam rangka pencapaian tujuan.

Dengan demikian jelas menunjukkan bahwa pengorganisasian merupakan langkah

pertama kearah pelaksanaan rencana yang telah disusun sebelumnya (Sondakh et al., 2019).

Kegiatan perencanaan pada tahap organisasi ditandai dengan adanya pembentukan kelembagaan untuk mendukung keberhasilan pengelolaan HKm, kepengurusan dalam organisasi, pemaksimalan organisasi untuk mendukung pengelolaan HKm dan keikutsertaan organisasi dalam memberikan arahan/ intruksi dalam pengelolaan HKm, serta tersedianya informasi mengenai pengelolaan Hutan Kemasyarakatan Desa Jati Mulyo Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

3. Pengelolaan Hutan Berdasarkan Pelaksanaan

Pelaksanaan (*actuating*) merupakan pelaksanaan rencana dan organisasi dimana semua komponen bekerja sesuai bidangnya masing-masing untuk mencapai suatu tujuan. Setelah perencanaan dibuat dan pengorganisasian disusun, maka langkah berikutnya adalah melakukan pelaksanaan / penggerakan / pengarahannya.

Actuating sering juga disebut sebagai *directing* dalam hal ini perintah merupakan alat utama pemimpin dalam menggerakkan orang-orangnya disamping petunjuk, nasehat, saran dan sebagainya sehingga mereka akan bekerja secara baik untuk mencapai rencana (Sondakh et al., 2019). Kegiatan pengelolaan pada fungsi pelaksanaan ditandai dengan keikutsertaan anggota gapoktanhut dalam pelaksanaan kegiatan yang tertuang dalam rencana kerja (RKU/ RKT) yang telah disusun, keikutsertaan anggota dalam kegiatan pemanfaatan hasil hutan, pola penanaman pada lahan HKm, kerjasama dan bantuan yang di dapatkan oleh anggota gapoktanhut dari instansi lain, pelatihan atau studi banding dan usaha perlindungan keanekaragaman yang ada pada kawasan HKm untuk dimanfaatkan secara berkelanjutan.

4. Pengelolaan Hutan Berdasarkan Pelaksanaan

Monitoring/ Evaluasi (*controlling*) merupakan pemantauan terhadap kegiatan proses perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan untuk memastikan apakah semua kegiatan tersebut mengarah pada hasil yang efektif dan efisien. Kegiatan perencanaan pada tahap monitoring/ evaluasi ditandai dengan kegiatan perlindungan pengamanan HKm, keikutsertaan anggota dalam evaluasi program/

kegiatan yang telah dilaksanakan dan keikutsertaan anggota dalam memberikan solusi terhadap masalah yang dihadapi maupun mengenai inovasi- inovasi yang dapat dilakukan dalam mengelola hutan kemasyarakatan. Pengawasan merupakan proses pengamatan, pemeriksaan, pengendalian dan pengoreksian daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya (Sondakh et al., 2019). Kegiatan-kegiatan yang tertuang dalam RKT/ RKU pada saat ini belum seluruhnya dilaksanakan, dikarenakan beberapa kendala yang dialami oleh anggota Gapoktanhut Wono Lestari sebagai pengelola HKm.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Persepsi anggota Gapoktanhut Wono Lestari dengan jumlah 50 responden memiliki pandangan/ persepsi baik dengan presentase 79.00 % terhadap pengelolaan Hutan Kemasyarakatan Desa Jati Mulyo Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
2. Responden memiliki persepsi yang baik terhadap pengelolaan berdasarkan fungsi perencanaan (*planning*) dengan persentase sebesar 82.36%, berdasarkan fungsi organisasi (*organizing*) sebesar 80.97%, berdasarkan fungsi pelaksanaan (*actuating*) sebesar 76.81% dan berdasarkan fungsi pengawasan (*controlling*) sebesar 74.75%.
3. Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan Desa Jati Mulyo oleh Anggota Gapoktanhut Wono Lestari berdasarkan analisis POAC sudah dilakukan berdasarkan rencana tata kelola (RKT/ RKU) yang telah di susun, akan tetapi perlu dilakukan pemaksimalan agar seluruh komponen fungsi manajemen POAC pada pengelolaan HKm dapat terlaksana.

Saran

Saran dari peneltian ini adalah: Peningkatan koordinasi dan komunikasi antar pengurus Gapoktanhut Wono Lestari dengan anggota pada hutan kemasyarakatan perlu ditingkatkan

lagi agar pengelolaan HKm semakin baik dan maksimal. Diharapkan kepada peneliti selanjutnya dapat meneliti mengenai kegiatan pengelolaan selanjutnya agar Hutan Kemasyarakatan Desa Jati Mulyo ini dapat terus lestari.

DAFTAR PUSTAKA

- Kaskoyo H, Febryano IG, Yuwono B. 2017. *Institutional Study of Farmers Group on Partnership Program in KPHP Way*. 5(1): 1–7.
- Nandini R. 2017. Evaluasi pengelolaan hutan kemasyarakatan (HKm) pada hutan produksi dan hutan lindung di pulau lombok. *Jurnal penelitian hutan tanaman*, 10.
- Silalahi J. 2011. Peran kelompok tani dalam pelestarian hutan di Dusun Pringsurat. Prosiding BP2LHK. Banjar Baru.
- Safe'i R, Febryano IG & Aminah LN. 2018. Pengaruh Keberadaan Gapoktan Terhadap Pendapatan Petani dan Perubahan Tutupan Lahan di Hutan Kemasyarakatan. *Sosiohumaniora-Jurnal Ilmu-ilmu Sosial dan Humaniora*.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2021. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11): 1- 268
- Susanti Y, Wulandari C, Yuwono SB & Kaskoyo H. 2021. Persepsi masyarakat terhadap pengelolaan agroforestri di Tahura Wan Abdul Rachman, Bandar Lampung. *Jurnal Hutan Tropis*. 9(2): 472.
- Sarintan Efratani, Damanik (2019) pemberdayaan masyarakat desa sekitar kawasan hutan. *Uwais Inspirasi Indonesia*.
- Athoillah, Anton. 2017. *Dasar-dasar Manajemen*. Bandung: CV Pustaka Setia
- Sanjaya R, Wulandari C & Herwanti S. 2017. Evaluasi Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm) pada Gabungan Kelompok Tani Rukun Lestari Sejahtera di Desa Sindang Pagar Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Lampung Barat. *Jurnal Sylva Lestari*. 5(2):30.
- Surat Keputusan Nomor 5787/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/9/2018 Tentang pemberian izin usaha pemanfaatan hutan kemasyarakatan (IUPHKm) kepada Gapoktanhut Wono Lestari.
- Yuzen N, Siregar YI & Saam Z. 2014. Hubungan antara kondisi sosial ekonomi dengan persepsi, sikap dan perilaku masyarakat Kabupaten Kerinci pada Hutan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS). *Jurnal Ilmu Lingkungan*.
- Soekartawi. 1986. *Ilmu usaha tani dan penelitian untuk pengembangan petani kecil*. Jakarta: Universitas Indonesia
- Nawawi Z. 2013. *Manajemen Pemerintahan*. Rajawali Pers. Jakarta
- Sondakh V, Suhaeni S & Lumenta. 2019. Persepsi masyarakat terhadap pengelolaan hutan mangrove di Desa Tiwoho Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara